



GAPKI

NEWS



MENGGALI SOLUSI KOMPLEKSITAS INDUSTRI SAWIT

“Antara Regulasi, Perdagangan Global,
dan Keberlanjutan”

Merumuskan Solusi

Pembaca yang budiman,

Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena buletin *GAPKI News* edisi Oktober 2025 telah terbit dan dapat pembaca nikmati. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus GAPKI Pusat dan GAPKI Cabang di penjurur Indonesia yang telah berkontribusi dan berbagi informasi perkembangan industri sawit.

Dalam dua bulan terakhir banyak peristiwa di industri kelapa sawit yang menuntut kita semakin bijak. Beberapa di antaranya kabar gembira kemenangan Indonesia atas Uni Eropa dalam sengketa bea masuk imbalan impor biodiesel. Putusan panel WTO menyingkap tabir proteksionisme terselubung oleh Uni Eropa atas nama keberlanjutan lingkungan.

Tersingkapnya diskriminasi Uni Eropa pada biodiesel asal Indonesia menambah keyakinan kita bahwa daya saing sawit memang tinggi dibandingkan produk sejenis. Namun, kondisi ini harus membuat kita lebih waspada karena tantangan industri sawit juga datang dari dalam negeri antara lain tumpang tindih regulasi, sampai produksi yang stagnan.

Ini semua menjadi pekerjaan rumah yang harus kita carikan solusinya. Pelaksanaan IPOC ke-21 bulan depan adalah forum yang tepat menggali jalan keluar merespon tantangan. IPOC sangat strategis untuk merumuskan kembali solusi terbaik bagi industri sawit. Dorongan untuk menggali solusi di industri ini menjadi tema utama *GAPKI News* edisi Oktober 2025.

Laporan lain dalam buletin ini mencakup aktivitas GAPKI yang berkaitan dengan dukungan terhadap peran petani, percepatan PSR, dan masukan kepada pemerintah untuk mencapai target 100 juta ton sawit pada tahun 2045. Semoga sajian buletin ini menambah wawasan kita ke depan. Terima kasih dan selamat membaca. ■

Salam,
Redaksi GAPKINews

GAPKINews

Media Komunikasi dan
Informasi Anggota GAPKI

PENERBIT
GAPKI Pusat

PEMBINA
Eddy Martono
Sany Anthony
Susanto Yang
Satrija B. Wibawa
M. Hadi Sugeng
Mona Surya

PENGARAH
Mukti Sardjono

TIM AHLI
Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat GAPKI

PENANGGUNG JAWAB
Bandung Sahari

Dewan Redaksi
Yudha Negara Nyoman
Indah Permata Soegyarto
Mochamad Husni
Dyah Laras Wulandari
Susan Sri Rahayu
Eko Tamba

ALAMAT
Kantor GAPKI Pusat
Sudirman Park Blok B-18
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871
gapki@gapki.id | gapkipusat@
yahoo.com



Lindungi dan Penuhi Hak Anak.....21

Salam Redaksi.....	2
Daftar Isi.....	3
Produksi Tinggi, Konsumsi Dalam Negeri Menurun.....	4
Dua Pilar Menjaga Daya Saing Sawit Indonesia.....	5
Menggali Solusi Kompleksitas Industri Sawit.....	6,7
Proyeksi dan Realisasi Harga dari IPOC.....	8
GAPKI Paparkan Strategi Produksi Sawit 100 Juta Ton.....	9
Petani Belum Siap, GAPKI Minta EUDR Ditunda.....	10
GAPKI Perkuat Diplomasi Sawit di China.....	11
Tidak Ada Alasan Menunda Sertifikasi ISPO.....	12
Tingkatkan Implementasi SMK3 GAPKI Bentuk Forum K3.....	13
GAPKI Usulkan Skema Kemitraan Berkeadilan.....	14



GAPKI-OJK Sepakat Pentingnya
Forum Penanganan Industri Sawit.....15



GAPKI Dorong Penguatan Kesetaraan Hak Pekerja
Perempuan.....16

GAPKI Dorong Penguatan Peran ASPEKPIR di Industri Sawit.....	17
Borneo Forum 2025 Kaji PR Besar Industri Sawit.....	18
Edukasi Sawit untuk Generasi Muda.....	19
GAPKI Berikan Masukan Penilaian Proper 2025.....	20
Gubernur Kaltim Minta GAPKI Perkuat Kemitraan Strategis.....	22
GAPKI Riau Dorong Penguatan Program K3.....	23
GAPKI-BEI Tingkatkan Pemahaman Tentang Pasar Modal.....	24
Memperluas Akses Sawit Berkelanjutan di China.....	25
GAPKI Tegaskan Komitmen Pada Kesejahteraan Buruh.....	26
GAPKI Perkuat Kerjasama dengan India.....	27

PRODUKSI TINGGI, KONSUMSI DALAM NEGERI MENURUN

Peningkatan nilai ekspor didukung harga rata-rata Januari-Juli 2025.

Kinerja industri sawit menunjukkan performa tinggi sepanjang Juli 2025 dengan produksi CPO mencapai 5,113 juta ton dan PKO 493 ribu ton. Produksi CPO ini naik 6% dibandingkan produksi Juni 2025 sebesar 4,823 juta ton. Secara tahunan (*year on year*) hingga Juli 2025, gabungan produksi CPO dan PKO mencapai 33,495 juta ton atau lebih tinggi 11,11% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 30,146 juta ton.

Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono mengatakan kenaikan produksi ini mencerminkan keberhasilan strategi industri sawit, termasuk penerapan praktik budidaya berkelanjutan dan teknologi panen yang lebih efisien. "Produsen sawit terus meningkatkan produktivitas sambil mematuhi standar keberlanjutan sehingga produksi tetap tinggi walau ada tantangan cuaca dan harga global," katanya.

Di tengah produksi yang tinggi, konsumsi dalam negeri justru

menurun. Konsumsi oleokimia turun 3,65% menjadi 185 ribu dibandingkan Juni 2025 sebesar 192 ribu ton. Konsumsi biodiesel turun 2,69% menjadi 1,051 juta ton dibandingkan Juni 2025 sebesar 1,080 juta ton. Konsumsi pangan turun 0,25% menjadi 798 ribu ton dibandingkan Juni 2025 sebesar 800 ribu ton.

Penurunan juga terjadi pada ekspor produk sawit. Sepanjang Juli 2025, total ekspor 3,537 juta ton atau turun 1,92% dibandingkan Juni 2025 sebesar 3,606 juta ton. Penurunan ekspor terbesar pada minyak sawit olahan sebesar 11,26% dari 2,599 juta ton pada Juni 2025 menjadi 2,307 juta ton pada Juli 2025. Ekspor olahan minyak inti sawit juga turun 1,70% dari 167 ribu ton pada Juni 2025 menjadi 164 ribu ton pada Juli 2025. Ekspor CPO naik 49,75% dari 418 ribu ton pada Juni 2025 menjadi 626 ribu ton pada Juli 2025. Kenaikan ekspor 4,33% terjadi pada oleokimia dari 420 ribu ton pada Juni 2025 menjadi 438 ribu ton pada Juli 2025.

Untuk negara tujuan, kenaikan ekspor bulan Juli 2025 dibandingkan Juni 2025 terjadi untuk tujuan India (126 ribu ton), Pakistan (118 ribu ton), Bangladesh (26 ribu ton). Penurunan ekspor terjadi untuk tujuan China yakni 165 ribu ton, Afrika 105 ribu ton, Uni Eropa 53 ribu ton, Rusia 51 ribu ton, Malaysia 38 ribu ton, dan USA sebesar 7 ribu ton.

Nilai ekspor produk sawit Juli 2025 naik 1,46% dari USD 3,636 miliar pada Juni 2025 menjadi USD 3,690 miliar pada Juli 2025. Secara *year on year* hingga Juli 2025, total nilai ekspor 2025 mencapai USD 20,966 miliar atau lebih tinggi 41,59% dibandingkan total ekspor tahun 2024 sebesar USD 14,808 miliar. Peningkatan nilai ekspor didukung harga rata-rata Januari-Juli 2025 sebesar USD 1.191/ton Cif Rotterdam yang lebih tinggi dari rata-rata Januari-Juli 2024 sebesar USD 1.003/ton Cif Rotterdam.

Dengan stok awal Juli 2025 sebesar 2,530 juta ton, produksi CPO+PKO naik menjadi 5,606 juta ton, konsumsi dalam negeri turun menjadi 2,034 juta ton dan ekspor turun menjadi 3,537 juta ton, serta stok di akhir Juni 2025 naik menjadi 2,568 juta ton. ■



DUA PILAR MENJAGA DAYA SAING SAWIT INDONESIA



PKS yang tidak cermat menerima TBS memperburuk efisiensi industri.

GAPKI mengusulkan penguatan dua pilar utama untuk menjaga daya saing minyak sawit Indonesia di tengah tantangan nasional dan internasional yang semakin besar. “Pertama peningkatan produktivitas. Kedua kepastian hukum,” kata Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono ketika menjadi pembicara dalam konferensi *3rd Technology and Talent Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) 2025* di Bandung, 8–10 Juli 2025. Konferensi yang diadakan *Media Perkebunan* dan *Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan (P3PI)* ini mempertemukan pelaku industri, penyedia teknologi, akademisi, dan pemerintah pengambil kebijakan.

Konferensi yang mengangkat tema utama *Updating Technology & Talent*

for Palm Oil Mill and Downstream ini bertujuan memperkuat sinergi antara teknologi dan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pengolahan sawit berkelanjutan. Selain GAPKI, pemateri lainnya adalah Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, Bambang, M.M, Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Dida Gardera, dan Ketua P3PI Posma Sinurat.

Menurut Mukti Sardjono, penguatan dua pilar di dalam negeri ini bersifat fundamental guna menghadapi tantangan global. Apalagi dua pilar ini saling berhubungan. Produktivitas sawit nasional sekarang stagnan dan cenderung menurun. Sebagai contoh, produksi CPO hingga April 2025 sebanyak 16,49 juta ton. Jumlah ini setara dengan produksi

tahun sebelumnya. Akibatnya ekspor menurun yang berdampak pada penerimaan negara dari pungutan ekspor dan dana subsidi biodiesel.

Penurunan produktivitas disebabkan oleh lambatnya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan persoalan legalitas lahan sawit di kawasan hutan yang belum tuntas. Penyelesaian masalah lahan belakangan ini justru dikhawatirkan berdampak pada produksi minyak sawit. Padahal permintaan minyak sawit, baik dari dalam maupun luar negeri terus meningkat. Konsumsi dalam negeri saja naik tajam. Pada 2024, konsumsi dalam negeri mencapai 23,8 juta ton, naik signifikan dibandingkan sebelumnya. Penggunaan CPO untuk biodiesel melampaui sektor pangan, terutama setelah diterapkannya kebijakan B40.

Produktivitas yang menurun juga disumbangkan oleh faktor lain seperti kualitas bahan baku tandan buah segar yang tidak konsisten. Tidak sedikit PKS yang menerima TBS yang belum matang sempurna atau bahkan sudah busuk.

Dampaknya pada kualitas CPO. PKS yang tidak cermat menerima TBS memperburuk efisiensi industri. Apalagi banyak pabrik yang masih menggunakan peralatan produksi tua. Efisiensi produksi tidak tercapai. Ini menjadi problem tambahan di tengah meningkatnya beban industri

GAPKI mendorong perbaikan menyeluruh yang dimulai dari percepatan PSR, penggunaan klon unggul berproduksi tinggi, penyelesaian legalitas lahan sawit di kawasan hutan tanpa mengganggu produksi, dan pengurangan beban ekspor dengan mengevaluasi pungutan ekspor, bea keluar, dan kebijakan *domestic market obligation* (DMO). Pengembangan kebun khusus untuk biodiesel perlu dilakukan. “Kita terus mendorong pembentukan badan sawit yang mengatur pengembangan industri sawit hulu-hilir secara terintegrasi,” katanya. ■

MENGGALI SOLUSI KOMPLEKSITAS INDUSTRI SAWIT

Uni Eropa terbukti diskriminatif dan terungkap dalam putusan sidang pleno WTO.

Harapan yang ditunggu pemerintah dan pelaku industri sawit Indonesia itu akhirnya datang juga. Setelah lima tahun yang melelahkan, melewati serangkaian pendekatan hingga sidang. Panel WTO (*World Trade Organization*) memenangkan Indonesia dalam sengketa bea masuk imbalan impor (*countervailing duties/CVD*) atas produk biodiesel asal Indonesia melawan Uni Eropa pada 22 Agustus 2025. Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi pada biodiesel dari Indonesia dengan kedok keberlanjutan lingkungan.

Uni Eropa menerapkan CVD pada biodiesel Indonesia sejak 2019 dengan nilai 8% - 18% yang diprotes keras Indonesia. Melalui kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II pada 2019, Uni Eropa memasukan minyak sawit sebagai produk *high ILUC-risk*. ILUC (*Indirect Land Use Change*) yakni konsep yang terkait penggunaan lahan. Dalam hal ini sawit dianggap sebagai tanaman berisiko tinggi. Faktanya, kebijakan ini sebagai proteksionisme terselubung untuk menyamarkan kepentingan dagang Uni Eropa atas nama keberlanjutan lingkungan.

Kemenangan Indonesia dalam sengketa bea masuk imbalan impor biodiesel bukan sekadar kemenangan untuk industri sawit. Ada hal lebih besar yang terungkap yakni posisi Uni Eropa yang berbalik menghadapi tekanan besar. Selama ini, Uni Eropa memimpin kampanye global atas nama keberlanjutan. Faktanya banyak aspek tersembunyi di balik kampanye ini yang pada dasarnya hanya untuk kepentingan bisnis semata. Uni Eropa terbukti diskriminatif dan terungkap dalam

Hambatan tarif yang membuat daya saing biodiesel tidak kompetitif di pasar Eropa sudah terhapus.

putusan sidang pleno WTO.

Putusan panel WTO disambut positif GAPKI. "Ini sangat positif. Namun, kita lihat apakah Uni Eropa akan banding atau menerima putusan ini," kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Jika Uni Eropa tidak melakukan banding dalam 60 hari ke depan, maka hambatan tarif pada produk biodiesel dihapus. Uni Eropa diharapkan menerima putusan ini sehingga perlakuan terhadap biodiesel dari Indonesia sama dengan produk sejenis yang terbuat dari *rapeseed*, minyak bunga matahari, atau *soybean* yang menjadi produk mereka.

Bagi produk sawit dari Indonesia,

Uni Eropa merupakan pasar yang cukup penting meskipun bukan yang terbesar. Volume ekspor minyak sawit ke benua biru ini rata-rata 3-4 juta ton per tahun, masih di bawah Tiongkok dan India. Sedangkan ekspor biodiesel ke Uni Eropa relatif lebih kecil karena biodiesel Indonesia sebagian besar diserap untuk kebutuhan dalam negeri sebagai program yang bersifat *mandatory*.

Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng memandang keputusan panel WTO sebagai angin segar bagi industri sawit nasional. Hambatan tarif yang membuat daya saing biodiesel tidak kompetitif di pasar Eropa sudah terhapus. Walaupun dari aspek volume ekspor tidak terlalu signifikan, namun kemenangan di panel WTO memiliki dampak besar terhadap sektor sawit nasional. "Kebijakan *biofuel* Indonesia tidak melanggar prinsip perdagangan internasional. Keputusan WTO membuktikan tuduhan Uni Eropa tidak benar," katanya.

Meskipun keputusan panel WTO menguntungkan, bukan berarti hambatan terhadap produk sawit di pasar Eropa berakhir. Apalagi Uni Eropa belum menyesuaikan peraturan *Renewable Energy Directive* (RED) II meskipun WTO telah mengeluarkan putusan. Peluang lainnya yang berpotensi positif pada produk sawit adalah *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) yang masih dalam tahap negosiasi. "Ini akan membuka peluang besar jika hambatan non-tarif dihapus," kata Eddy Martono.

Di tengah kabar positif ini, tantangan industri sawit ternyata masih tampak jelas di depan mata. Pada akhir tahun, Uni Eropa akan memberlakukan EUDR, tepatnya Desember 2025. "Kalau sawit Indonesia tidak *comply* dengan EUDR,



ekspor bisa terganggu,” katanya. Untuk penerapan EUDR, korporasi sawit dinilai cukup siap. Namun, bagi petani sawit, kebijakan EUDR adalah hambatan besar. Perusahaan sawit yang menampung produk petani yang tidak sejalan dengan EUDR akan terkena dampaknya.

GAPKI secara berkesinambungan mendorong petani sawit berbenah untuk dapat memenuhi tuntutan pasar global. Kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk petani sawit rakyat selanjutnya harus dipercepat. Surat kepemilikan ini sangat penting untuk meyakinkan Uni Eropa tentang produk dari petani sawit. Begitu juga dengan sertifikasi ISPO yang sudah menggunakan ketentuan terbaru. “Hal ini penting agar Indonesia bisa mengulang sukses seperti saat Uni Eropa akhirnya mengakui skema ISPO,” katanya.

Dalam pandangan GAPKI, pembenahan internal industri sawit adalah kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola dan peremajaan sawit rakyat. Kondisi sektor sawit dalam lima tahun belakangan ini adalah cermin. Produksinya stagnan di kisaran 50 juta ton/tahun. Padahal konsumsi domestik dan pasar ekspor membutuhkan jumlah yang lebih besar. Salah satu faktor produksi stagnan adalah usia sawit yang menua dan keterlambatan peremajaan sawit rakyat.

“Tanaman sawit itu seperti manusia. Kalau sudah tua, diberi pupuk sebanyak apa pun tidak akan produktif lagi. Harus diremajakan. Sayangnya, PSR hingga kini belum pernah mencapai target,” katanya. Hambatan PSR cukup beragam mulai dari legalitas lahan, status kawasan hutan, hingga petani yang enggan meremajakan sawitnya karena sawit tidak berproduksi selama masa peremajaan. Padahal produktivitas sawit yang diremajakan meningkat



hingga 2,5 kali lipat setelah usia 4–5 tahun.

Selain itu, tantangan internal lainnya adalah meningkatnya jumlah campuran minyak sawit untuk biodiesel. Pada dasarnya produksi nasional masih cukup untuk mendukung program B50. Namun, ada risiko pengurangan ekspor demi memenuhi kebutuhan domestik. Apabila langkah ini ditempuh, dampaknya cukup signifikan terhadap pungutan ekspor yang turun. Padahal selama ini pungutan ekspor bukan hanya untuk insentif biodiesel, tapi juga untuk PSR. “Ini seperti lingkaran setan kalau sampai dana berkurang,” katanya.

Karena itu, GAPKI mengusulkan supaya kebijakan mandatori biodiesel perlu dibuat fleksibel menyesuaikan kondisi pasar global dan kebutuhan dalam negeri. Kebijakan yang fleksibel diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan ekspor dan kebutuhan domestik sehingga semua program pemerintah berjalan lebih optimal. Mengorbankan salah satunya tentu bukan langkah yang bijak. Apalagi keduanya memiliki urgensi yang tinggi dan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Tantangan eksternal dan internal industri sawit ini diharapkan menemukan solusi terbaik dalam waktu yang tidak lama. Pelaksanaan

IPOC ke-21 pada 12-14 November 2025 nanti di Bali diharapkan melahirkan masukan konkret sebagai pijakan pengambilan keputusan oleh pemerintah, pelaku industri sawit, dan semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit. Tantangan industri sawit memang kompleks. Karena itu, diperlukan navigasi sebagai alat untuk menghadapi tantangan untuk mendorong pertumbuhan industri ini.

IPOC 2025 dengan tema besar *Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy and Global Trade* adalah cermin kondisi industri sawit sekarang sekaligus merancang strategi untuk menghadapi masa depan. Rumusan jalan keluar diharapkan lahir dari IPOC 2025 sekaligus memberikan gambaran tentang masa depan sawit melalui proyeksi harga 2026 yang selalu menarik perhatian industri sawit global.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono berharap industri sawit terus tumbuh dan berkembang serta tidak salah kelola agar tidak bernasib seperti industri perkebunan lainnya seperti karet, kakao, kelapa, kopi, tebu dan gula serta komoditas lainnya. Apalagi pemerintah mematok komoditas sawit sebagai salah satu tulang punggung Indonesia mewujudkan Indonesia Emas 2045 bersama kelapa sawit. ■



PROYEKSI DAN REALISASI HARGA DARI IPOC

Di pasar minyak sawit global, CPO Indonesia mendominasi sekitar 60% pasar.

Konferensi tahunan terbesar GAPKI, *Indonesian Palm Oil Conference* (IPOC) akan hadir satu bulan lagi. Tepatnya 12-14 November 2025 di Bali International Convention Center, The Westin Resort, Nusa Dua, Bali. Konferensi 21st *Indonesian Palm Oil Conference 2025 and Price Outlook 2026* ini mengangkat tema utama *Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy and Global Trade* sebagai cermin kondisi industri sawit di masa sekarang dan proyeksi untuk masa depan. Paling tidak untuk satu tahun mendatang.

IPOC merupakan momentum paling ditunggu tidak hanya oleh pelaku industri kelapa sawit nasional, namun juga industri sawit global. Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia menjadi barometer penting industri minyak nabati dunia. Kontribusi minyak sawit terhadap minyak nabati global mencapai 42%. Di pasar minyak sawit global, CPO Indonesia mendominasi sekitar 60% pasar. Dengan kontribusi ini, tidak



mengherankan jika konferensi internasional IPOC menjadi referensi penting pelaku industri sawit dan minyak nabati global.

Salah satu momen paling ditunggu dari setiap pelaksanaan IPOC tentu saja proyeksi harga CPO untuk satu tahun ke depan. Akurasi prediksi harga minyak sawit dunia yang dipaparkan sejumlah pakar menjadi panduan pelaku industri. Pada IPOC 2024, Dorab Mistry, Direktur Godrej International Ltd, memprediksi harga CPO tahun 2025 sekitar RM 4.500-5.000/MT. Bahkan, ada peluang lonjakan harga hingga RM 5.400/MT pada triwulan pertama 2025 jika tidak ada faktor signifikan yang menjadi tekanan bagi industri sawit.

Analisis lainnya yang hadir di IPOC 2024 seperti Thomas Mielke juga memperkirakan harga CPO di angka yang tidak jauh berbeda. Menurut Direktur Eksekutif ISTA Mielke GmbH. Harga CPO dunia diperkirakan mampu menembus USD 1.000/MT pada tahun 2025. Kenaikan harga hingga 10-15 persen bukan sesuatu yang mustahil. Peningkatan penggunaan minyak sawit dalam program B40 di Indonesia berpengaruh pada harga minyak sawit dunia.

Proyeksi harga CPO dari para analisis rata-rata sejalan dengan kondisi pasar. Harga CPO pada periode Januari-



Maret 2025 misalnya, mencapai RM 4.415/MT. Realisasi harga minyak sawit ini meningkat sekitar 11,84% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Ditjen Bea dan Cukai mencatat volume ekspor produk sawit pada Januari-Maret 2025 mencapai 9 juta ton. Proyeksi harga CPO yang disampaikan dalam IPOC 2024 juga menjadi kenyataan hingga memasuki enam bulan pertama 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga CPO dan turunannya di tingkat global adalah USD 1.053,03/MT pada Januari—Juni 2025, atau naik 22,21% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 di level USD 861,65/MT.

Sedangkan volume ekspor minyak sawit dan turunannya pada Januari-Juni 2025 meningkat 2,69% dari 10,72 juta ton menjadi 11 juta ton pada semester I/2025. Akurasi proyeksi sangat penting bagi pelaku usaha. Apalagi yang berkaitan dengan harga. Akurasi analisis ini tidak hanya sekali ini terjadi, namun berkelanjutan pada setiap acara IPOC setiap tahun.

Karena itu, IPOC selalu menjadi referensi bagi pelaku industri sawit untuk menata dan mengembangkan usahanya. ■



GAPKI PAPARKAN STRATEGI PRODUKSI SAWIT 100 JUTA TON

“Kita butuh jalan tol kebijakan. Harus ada satu badan khusus yang mengurus sawit.”

Produksi sawit 100 juta ton menjadi target yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2045, tepat ketika Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Banyak target yang diharapkan pemerintah pada usia satu abad yang populer dengan Indonesia Emas 2045. Memproduksi sawit 100 juta ton artinya produksi naik 2 kali lipat dibanding produksi tahun 2024 sebesar 52,76 juta ton. Waktu yang tersisa hanya 20 tahun untuk menuju 2045.

“Kita harus berani dan progresif untuk mengejar 100 juta ton,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam seminar di ajang SIEXPO 2025 yang diadakan oleh *Majalah Sawit Indonesia* di Pekanbaru, Riau pada 7 Agustus 2025. Masalah besar yang dipaparkan GAPKI bertajuk *Mampukah Produksi Sawit 100 Juta Ton Tercapai pada 2045?* Ajang ini dihadiri 10 ribu lebih pengunjung



dan menampilkan 500 produk dan teknologi terbaru tentang sawit serta seminar oleh perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan petani sawit.

Langkah berani dan progresif tidak hanya dilakukan oleh industri, namun juga pemerintah dan seluruh pihak yang terkait dengan sektor sawit. Langkah pertama adalah moratorium pemberian izin baru pembukaan lahan sawit dicabut. Moratorium berlaku sejak disahkan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit pada 19 September 2018. Meskipun moratorium hanya berlaku selama tiga tahun sampai September 2021, faktanya kebijakan ini masih tetap berlaku.

Menurut Eddy Martono, untuk mengejar produksi dua kali lipat dari sekarang, dibutuhkan tambahan lahan sekitar 5 juta hektar. Tambahan lahan ini diharapkan mencapai fase puncak produksi pada tahun 2045 untuk menopang pencapaian 100 juta ton. Selain pencabutan moratorium, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus dipacu hingga 250 ribu hektar per tahun. Tapi, luas lahan PSR saat ini turun dari 150 ribu hektar

menjadi 120 ribu dan 80 ribu hektar per tahun. “Diperlukan insentif agar petani bersemangat,” katanya.

Langkah strategis ketiga adalah menyelesaikan masalah EUDR. Uni Eropa memang menunda berlakunya UEDR dari akhir 2024 menjadi akhir 2025. Saat ini pemerintah terus melakukan terobosan untuk memenuhi tuntutan EUDR. Namun, GAPKI meminta penerapan EUDR bisa ditunda karena petani sawit (*smallholder*) terkena dampak paling besar. “Korporasi juga terkena dampak penerapan EUDR,” katanya.

Permintaan CPO Indonesia dari Uni Eropa memang menurun sejak 2018. Namun, kondisi ini bisa saja berbalik dengan memanfaatkan negara lain seperti Mesir menjadi *Hub* pengiriman. “Kami yakin masih bisa meningkatkan kembali ekspor ke Uni Eropa. Mesir bisa kita jadikan *hub*,” katanya. Meski demikian, industri sawit harus tetap berbenah untuk dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh negara pengimpor CPO Indonesia.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono juga menegaskan pentingnya badan tunggal yang memiliki kewenangan mengurus sektor sawit. “Kita butuh jalan tol kebijakan. Kalau mau 100 juta ton di 2045, harus ada satu badan khusus yang mengurus sawit,” katanya. ■





PETANI BELUM SIAP, GAPKI MINTA EUDR DITUNDA

“Kalau hanya petani Uni Eropa atau Amerika yang mendapat perlakuan bebas risiko, kita harus bersikap.”

GAPKI tetap pada pendirian semula yakni meminta Uni Eropa menunda penerapan EUDR di Indonesia karena petani kelapa sawit dinilai belum siap. Penundaan selama satu tahun dinilai belum cukup sebagai masa transisi menerapkan persyaratan yang diminta Uni Eropa. “Yang paling rentan dengan penerapan EUDR adalah *smallholders*,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam GAPKI

Roundtable Discussion with Palm

Oil Stakeholders dengan tema *Step-by-Step Journey of EUDR: Burden or Benefit?* di Jakarta pada 3 Juli 2025.

Dengan kondisi petani sawit di Indonesia sekarang, GAPKI meminta waktu transisi lebih panjang agar petani benar-benar siap dengan ketentuan dalam EUDR. Apabila penerapan EUDR tetap dipaksakan seperti kemauan Uni Eropa, Indonesia akan menghadapi dampak besar dari pemberlakuan EUDR. Kebijakan ini mewajibkan setiap produk yang masuk pasar Uni Eropa bebas dari unsur deforestasi. Artinya produk itu tidak boleh berasal dari lahan yang mengalami pembukaan hutan atau degradasi lingkungan.

Untuk memenuhi ketentuan EUDR, tantangan besar bukan hanya terletak pada sisi teknis dan administratif, tetapi juga kapasitas petani kecil yang belum memiliki akses memadai terhadap sistem verifikasi rantai pasok yang diminta Uni Eropa. Dalam daftar negara dengan tingkat risiko, Indonesia memang masuk kategori risiko menengah (*standard risk*). Kategori ini dinilai cukup baik. Namun, jika nantinya hanya negara dengan kategori *low risk* yang bebas dari kewajiban EUDR, hal dinilai tidak adil. “Ini menjadi bentuk diskriminasi,” katanya.

Dalam daftar risiko deforestasi yang dirilis Uni Eropa pada Mei 2025, Indonesia masuk dalam kategori risiko menengah. Sedangkan Rusia,

Myanmar, Korea Utara, dan Belarusia tercatat sebagai negara berisiko tinggi. Sedangkan 27 negara Uni Eropa, Amerika Serikat dan China hanya masuk kategori *low risk* yang tidak perlu melalui proses penelusuran asal-usul produk secara ketat. “Kalau hanya petani Uni Eropa atau Amerika yang mendapat perlakuan bebas risiko, kita harus bersikap,” katanya.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Uni Eropa mengirim proposal yang berisi pengecualian peraturan EUDR untuk petani Uni Eropa. “Mereka mengenalkan satu *standard* baru namanya *negligible risk* yang hanya berlaku untuk petani Uni Eropa,” katanya. Hal ini tentu tidak adil dan cenderung diskriminatif terhadap petani-petani dari negara lain seperti Indonesia.

Sejauh ini pemerintah sudah berupaya menjelaskan kondisi petani komoditas yang masuk dalam daftar Uni Eropa yakni komoditas ekspor coklat, karet, kopi, hingga sawit. Apabila ketentuan EUDR diterapkan, dampak yang paling terasa pasti kepada petani. “Terutama *smallholders* di karet, coklat, kopi, dan sawit,” katanya. Karena itu, pemerintah dan GAPKI mengajak para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum EUDR benar-benar diterapkan oleh Uni Eropa. ■



GAPKI PERKUAT DIPLOMASI SAWIT DI CHINA

GAPKI menegaskan komitmennya dalam menerapkan sawit berkelanjutan di depan para pemangku kepentingan industri minyak nabati di China. Penegasan ini disampaikan oleh Kabid Hubungan Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Hasan dalam *16th China International Cereals & Oils Industry Summit 2025* di Guanzhou, China pada 10-11 Juli 2025. Dalam sesi *Global Palm Oil Supply*, M. Fadhil Hasan juga menegaskan komitmen Indonesia sebagai pemasok utama minyak sawit di pasar global.

Dalam event ini, M. Fadhil Hasan membawakan materi *Indonesian Palm Oil Export Policies and Sustainability* untuk menjelaskan arah kebijakan ekspor Indonesia dan kontribusi sawit terhadap praktik keberlanjutan yang diakui dunia internasional. Penegasan ini disampaikan di hadapan para pemangku kepentingan industri pangan dan energi nabati dari berbagai negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Kepercayaan kepada GAPKI sebagai pemateri sesi utama menunjukkan posisi strategis sawit Indonesia dalam rantai pasok global.

"Indonesia tidak hanya berkomitmen sebagai pemasok utama minyak sawit dunia, namun juga sebagai pelopor dalam produksi sawit berkelanjutan yang memenuhi standar seperti ISPO dan RSPO," kata M. Fadhil Hasan. Pemaparan GAPKI mendapatkan respon positif karena komitmen Indonesia menjaga pasokan untuk pasar dunia. Penegasan ini membuat pertumbuhan pasar minyak nabati dunia lebih stabil dan tidak terganggu akibat pasokan yang berkurang karena program yang dijalankan pemerintah Indonesia.

Produksi sawit di Indonesia memang cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir akibat banyak tanaman berusia tua dan keterlambatan *replanting*. Meski demikian, produksi sawit nasional pada tahun 2024 masih mencapai 52,7 juta ton, lebih rendah 3,8% dibandingkan produksi tahun 2023 sebesar 54,8 juta ton. Tidak kurang



dari 16 juta orang yang terlibat di dalam sektor perkebunan sawit ini. Dengan produksi sebanyak itu, Indonesia menduduki posisi pertama produsen minyak sawit dunia.

Forum *China Oils Summit* dikenal sebagai salah satu ajang terbesar yang membahas isu-isu strategis dalam industri minyak nabati global. Dari pasokan, harga, ketahanan pangan, hingga regulasi lintas negara, semua menjadi bahan diskusi hangat.

Acara bergengsi ini rutin mempertemukan para pelaku industri, pengambil kebijakan, peneliti, hingga investor dari berbagai penjuru dunia mulai dari Asia, Eropa, hingga Afrika yang sama-sama peduli akan masa depan minyak nabati dunia.

Di forum ini, GAPKI hadir membawa data kontribusi nyata Indonesia dalam industri minyak sawit global. Indonesia tercatat memproduksi 45 juta ton minyak sawit mentah (CPO) setiap tahunnya.

Angka yang mencengangkan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dunia dalam sektor ini. Tak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, CPO asal Indonesia juga diekspor ke lebih dari 150 negara. China, India, Pakistan, Uni Eropa, hingga sejumlah negara di Afrika menjadi pasar utama yang secara konsisten menyerap produk sawit nasional.

Lebih jauh, GAPKI juga menyoroti peran strategis minyak sawit Indonesia dalam menopang ketahanan pangan dan energi berbasis nabati global.

Di tengah tantangan krisis energi dan pangan yang melanda banyak negara, minyak sawit Indonesia menjadi salah satu solusi penting. Produk ini bukan hanya menjadi bahan baku utama untuk minyak goreng, tetapi juga diolah menjadi biodiesel yang mendukung transisi energi bersih.

Kehadiran GAPKI dalam forum ini menegaskan posisi strategis Indonesia dalam kancah global. Lewat data dan paparan yang disampaikan, dunia internasional kembali diingatkan bahwa keberadaan industri sawit Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata baik dari sisi ekonomi, ketahanan pangan, hingga energi berkelanjutan.

Sebagai salah satu negara tujuan ekspor CPO Indonesia, China memiliki peran penting dalam perdagangan minyak nabati dunia. Dengan populasi penduduk 1,4 miliar jiwa, kebutuhan minyak nabati belum dapat dipenuhi oleh pasar domestik. China harus mengeksport minyak nabati, antara lain minyak sawit untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak heran kalau China menjadi pasar penting CPO Indonesia. Diplomasi industri sawit dengan China perlu diperkuat melalui partisipasi di berbagai event internasional di negeri Tirai Bambu ini. ■

TIDAK ADA ALASAN MENUNDA SERTIFIKASI ISPO

Implementasi ISPO untuk kebun rakyat baru mencapai 0,8% dari total kebun rakyat.

Pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi sertifikasi sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sejak menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 menggantikan Perpres Nomor 44 Tahun 2020. Sertifikat ISPO terbaru memiliki cakupan lebih luas daripada ISPO sebelumnya sehingga perusahaan sawit maupun petani perlu memahaminya dengan lebih komprehensif. Untuk keperluan itu, pemerintah menggelar sosialisasi Sistem ISPO di berbagai daerah dengan melibatkan BPDP, GAPKI, dan asosiasi petani kelapa sawit.

Dalam *Workshop dan Sosialisasi Sistem ISPO* di Hotel Aryadhuta, Palembang pada 14 Juli 2025, GAPKI diwakili oleh Direktur Eksekutif Mukti Sardjono dan Ketua Bidang Perkebunan R. Aziz Hidayat. Partisipasi GAPKI dalam sosialisasi Sistem ISPO terbaru ini juga dilakukan di berbagai daerah. Sebagai organisasi pengusaha kelapa sawit, GAPKI berkomitmen untuk terus mendorong anggotanya dan petani yang bermitra dengan anggota GAPKI melakukan sertifikasi ISPO. GAPKI juga memberikan masukan kepada pemerintah.

Salah satu masukan yang diberikan Ketua Bidang Perkebunan GAPKI adalah



pembentukan Pelaksana Harian Komite ISPO. Tujuannya tidak lain mempercepat sertifikasi ISPO untuk perusahaan sawit maupun petani. Apalagi implementasi ISPO terbaru ditangani oleh empat kementerian koordinator sekaligus sehingga diperlukan pelaksana teknis harian di lapangan. Di sisi yang lain, regulasi terbaru ini mencakup sertifikasi ISPO kebun sawit, industri hilir sawit dan usaha *bioenergy* sawit.

Menurut R Aziz Hidayat, selama ini banyak kendala yang menghambat pelaksanaan ISPO antara lain legalitas lahan yang belum tuntas, produktivitas rendah, ketidakpastian harga Tandan Buah Segar (TBS), dan gangguan keamanan berupa

penjarahan yang masih terjadi di beberapa wilayah. Selain itu, disharmoni regulasi dan dualisme perizinan antara kebun dan pabrik kelapa

sawit (PKS) perlu dicarikan jalan keluar terbaik.

Sampai saat ini, implementasi ISPO untuk perkebunan rakyat baru mencapai 0,8% dari total perkebunan sawit rakyat. Sebagian besar kebun sawit rakyat yang sudah tersertifikasi ISPO adalah kebun yang bermitra dengan perusahaan inti. Karena itu, Ketua DPW Apkasindo Sumatera Selatan, M. Yunus mengajak semua pihak, terutama petani untuk menjadikan ISPO sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Salah satu caranya memberikan harga premium untuk TBS petani yang sudah memiliki sertifikat ISPO.

M. Yunus mengatakan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2025 seharusnya tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan sertifikasi ISPO. Sebab, pembiayaan sertifikasi ISPO bisa ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Akses terhadap pembiayaan bagi petani juga lebih terbuka dan lebih mudah. Sertifikat ISPO menjadi penting untuk mewujudkan sawit berkelanjutan yang menjadi pondasi bagi pengembangan perkebunan sawit rakyat maupun perusahaan. ■



TINGKATKAN IMPLEMENTASI SMK3, GAPKI BENTUK FORUM K3

Forum K3 terdiri dari 3 Pokja yakni Pokja Regulasi, Pokja Praktik Baik dan Pokja Inisiatif.

Sejalan dengan tantangan di industri kelapa sawit yang semakin kompleks, GAPKI berinisiatif meningkatkan penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui kajian yang lebih komprehensif. Apalagi beberapa ketentuan harus disesuaikan berdasarkan peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Untuk menyatukan pandangan tentang penerapan K3 di lingkungan anggota, GAPKI mengadakan Forum K3 di Kantor GAPKI Pusat di Jakarta pada 8 Agustus 2025.

Forum K3 yang diikuti oleh 21 orang perwakilan anggota GAPKI ini dipimpin oleh Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI, Sumarjono Saragih dan Kompartemen ISPO GAPKI, Ismu Zulfikar. Peserta forum diskusi dan berbagi pengalaman ini merupakan personel yang menangani K3 di perusahaan masing-masing. Dengan pengalaman di masing-masing perusahaan, forum ingin menggali lebih jauh tantangan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan.

Sumarjono Saragih mengatakan

forum ini wadah yang positif untuk berbagi pemikiran maupun pengalaman antar perusahaan. GAPKI ingin menggali lebih jauh tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan industri sawit. Secara garis besar, penerapan K3 di berbagai perusahaan memiliki standard yang sama. Namun, beberapa item harus diselaraskan dengan karakter masing-masing industri.

Salah satu tantangan besar yang menjadi pembahasan adalah beberapa aturan tentang K3 yang harus dijalankan di industri sawit. Misalnya, perusahaan perkebunan sawit mengharuskan hasil pemeriksaan atau pengujian mendapatkan surat keterangan dari pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

No. 5 Tahun 2018. "Ini berpotensi menimbulkan biaya tinggi," kata Sumarjono Saragih.

Selain itu, batas minimum pendidikan setingkat SLTP bagi operator pesawat angkat maupun pesawat angkut sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 8 Tahun 2020 juga menjadi topik hangat yang dibahas.

Pesawat angkat angkut seperti *forklift*, *crane*, *buldozer*, *excavator*, *conveyor* dan lain-lainnya merupakan alat yang sering digunakan dalam berbagai industri untuk mengangkat dan memindahkan material berat. Penggunaan alat ini memerlukan aturan yang ketat untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja.

Setelah mendengarkan penjelasan dari seluruh anggota GAPKI yang hadir, pertemuan ini merekomendasikan pembentukan Forum K3 GAPKI terdiri dari 3 Pokja yakni Pokja Regulasi, Pokja Praktik Baik dan Pokja Inisiatif.

Forum ini menjadi wadah diskusi berkala Forum K3 GAPKI untuk berbagai pengalaman dan peningkatan pelaksanaan K3 di perusahaan, pemberian masukan kepada Kemnaker terkait perbaikan regulasi dan koordinasi pelatihan K3. ■



GAPKI USULKAN SKEMA KEMITRAAN BERKEADILAN

Dengan skema ini petani lebih terlibat karena sudah ada value sharing.

Penurunan produktivitas sawit dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Selain berpengaruh pada penerimaan negara dan industri sawit itu sendiri, kondisi ini juga berpengaruh pada kesejahteraan petani. GAPKI sebagai asosiasi para pelaku bisnis di sektor sawit mengusulkan skema kemitraan yang lebih berkeadilan sebagai perbaikan atas kemitraan yang berjalan selama ini.

“Perbaikan kemitraan dalam industri sawit sudah saatnya dilakukan,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam pemaparannya di *Pertemuan Teknis Kelapa Sawit (PTKS) 2025* di Yogyakarta pada 16-17 Juli 2025. Kegiatan yang dihadiri 730 peserta dari 224 lembaga ini mengangkat tema *Transformasi Teknologi dan Inovasi untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan*. Selain seminar, pertemuan ini juga diramaikan dengan pameran teknologi hingga klinik sawit dengan menghadirkan ahli yang kompeten di bidangnya.

Menurut Eddy Martono, kemitraan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan produktivitas sawit. Produksi sawit memang menjadi problem besar dalam beberapa tahun ini. Produksi stagnan dan menurun. Padahal kontribusi sektor sawit sangat signifikan. Kontribusi ekspor produk sawit terhadap ekspor nonmigas

sekitar 12% dan naik pada masa pandemic Covid-19 (2020–2021) di saat ekspor lainnya melemah. Pada 2024, kontribusi ekspor sawit terhadap nonmigas mencapai 6,2%.

Hingga April 2025, ekspor sawit mencapai USD 10,8 miliar. Jumlah ini nyaris setara dengan surplus perdagangan nasional sebesar USD 11,1 miliar. Nilai ekspor ini tentunya masih akan meningkat hingga akhir 2025 mendatang. Meski demikian, produksi yang stagnan di tengah konsumsi yang meningkat justru wajib dicermati. Apalagi konsumsi sawit untuk biodiesel lebih tinggi dibandingkan untuk kebutuhan pangan. Hal ini terjadi pada 2023 dan 2024. Di sisi yang lain, ekspor ke China, India, Pakistan, dan Bangladesh hingga Maret 2025 turun.

Untuk menghadapi tantangan produktivitas dan keberlanjutan, GAPKI menawarkan skema kemitraan baru dengan prinsip berbagi nilai dan keterlibatan aktif petani.

Dengan skema ini petani lebih terlibat karena sudah ada *value sharing*, transparansi dalam perhitungan biaya dan pendapatan, serta pembinaan terstruktur. Skema kemitraan baru ini membuat petani lebih bergairah dan bersemangat meningkatkan produktivitas tanamannya.

Beberapa poin penting dalam skema baru ini adalah petani

mendapat bagian pendapatan yang lebih adil dan transparan (*value sharing*), SOP budidaya dan panen berbasis *Good Agriculture Practice* untuk menjamin kualitas produksi melalui praktik terbaik, akses terhadap pembiayaan dan sertifikasi di mana petani mendapatkan akses ke pembiayaan dengan pendampingan teknis, serta peluang mendapatkan sertifikasi ISPO/RSPO.

Poin penting lainnya yang termasuk dalam skema kemitraan ini adalah integrasi teknologi di mana penggunaan *platform digital monitoring*, *smart farming* seperti *drone* dan sensor tanah hingga edukasi berbasis *e-learning* juga didapatkan petani. Dengan reformasi skema kemitraan dan dukungan regulasi yang solid, GAPKI berharap industri sawit nasional mampu meningkatkan produktivitas dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional. ■



GAPKI-OJK SEPAKAT PENTINGNYA FORUM PENANGANAN INDUSTRI SAWIT

Kondisi ini harus dicermati serius karena penurunan produksi sawit berdampak luas.

Perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu andalan komoditas ekspor Indonesia memiliki potensi besar dalam *green financing* (pembiayaan hijau). Secara umum, *green financing* adalah investasi keuangan yang dialokasikan untuk proyek berkelanjutan yang berdampak positif bagi lingkungan. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar dengan GAPKI di Kantor OJK pada 29 Juli 2025.

Dalam pertemuan ini GAPKI diwakili oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Sekjen M. Hadi Sugeng, Bendahara Umum Mona Surya, Waketum II Susanto, Waketum III Satrija B Wibawa, Direktur Eksekutif Mukti Sardjono, dan anggota Dewan Pembina GAPKI Joko Supriyono.

Kepada GAPKI, OJK menjelaskan beberapa kriteria yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk kebutuhan *green financing*. Bahkan, ada ketentuan yang spesifik untuk industri kelapa sawit yang masih dapat didiskusikan. OJK meminta masukan dari GAPKI terkait pembiayaan untuk sawit.

Selain membahas pembiayaan hijau untuk proyek berkelanjutan,



dalam pertemuan ini GAPKI menjelaskan kondisi terkini industri sawit. Salah satunya pengambilalihan lahan-lahan sawit oleh Satgas PKH dan menyerahkan pengelolaan kebun-kebun yang disita oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Langkah yang ditempuh Satgas PKH perlu dicermati lebih jauh. Sebab, lahan sawit yang disita, beberapa di antaranya dikelola oleh perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan terbuka.

Beberapa risiko yang dapat ditimbulkan antara lain penurunan aset perusahaan yang terdaftar di pasar modal dan berdampak pada kepercayaan pasar. Potensi risiko lain adalah penurunan produksi sawit akibat peralihan pengelola lahan-lahan yang disita.

Kondisi ini harus dicermati serius karena penurunan produksi sawit berdampak pada banyak hal. Misalnya, volume ekspor menurun yang berakibat pada penurunan

penerimaan negara. Pungutan ekspor akan turun sehingga berdampak pada program biodiesel.

Setelah mendapatkan pemaparan lengkap kondisi terkini industri sawit, OJK sepakat melakukan diskusi (*Forum Group Discussion*) dengan melibatkan Bank Indonesia, Himbara dan Bursa Efek Indonesia. Pembentukan forum diskusi ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah penting bagi perkebunan kelapa sawit, terutama yang berkaitan dengan sektor keuangan. OJK berpandangan pentingnya menyelaraskan kebijakan biodiesel dengan peningkatan produksi dan manajemen ekspor yang semakin baik.

Sebagai sektor yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, industri sawit harus mendapatkan ruang yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang. Devisa sawit pada tahun 2024 mencapai Rp 440 triliun dengan produksi mencapai 52,7 juta ton. ■



GAPKI DORONG PENGUATAN KESETARAAN HAK PEKERJA PEREMPUAN



Gubernur Herman Deru mengapresiasi langkah progresif GAPKI dalam perlindungan pekerja perempuan.

Pesetaraan dan perlindungan hak pekerja perempuan menjadi salah satu faktor krusial dalam menjadikan industri sawit ramah pekerja perempuan. Penguatan dua aspek penting ini dilakukan secara konsisten oleh GAPKI bersama pemangku kepentingan lainnya. Salah satunya *Advokasi dan Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sumatera Selatan* di Palembang, 29 Juli – 1 Agustus 2025. Acara yang didukung oleh BPD ini mengangkat tema *Perempuan Setara, Sawit untuk Sumsel Maju* yang dihadiri oleh 170 peserta, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wakil Bupati Musi Rawas, Wakil Bupati Musi Banyuasin, dan lain-lainnya.

Ketua GAPKI Sumatera Selatan, Alex Sugiarto mengatakan perempuan adalah tulang punggung tersembunyi di balik industri produksi sawit yang menyerap 16,2 juta pekerja. Tapi, tantangan pekerja perempuan sangat kompleks. “Diperlukan upaya kolaboratif lintas sektor memperbaiki kondisi ini,” katanya. GAPKI sendiri sudah melangkah maju. Sejak 2019, GAPKI bersama mitra internasional

menyusun buku *Panduan Praktis Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit* yang kini menjadi rujukan bagi kebijakan internal perusahaan.

Alex Sugiarto mengatakan kegiatan ini mencakup tiga agenda besar antara lain Peluncuran Gerakan Perempuan Setara Sumsel. Selain itu, juga seminar nasional dengan narasumber dari berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional. Agenda ketiga adalah *workshop* dengan narasumber yang instansi yang relevan untuk menyusun tindak lanjut program konkret di tingkat perusahaan. GAPKI Sumsel berharap kegiatan ini menjadi tonggak penting penguatan dan perlindungan kesetaraan pekerja perempuan di sektor sawit.

Sebagai penanda penguatan program

ini, GAPKI menyematkan rompi kehormatan kepada Duta *Gender Equality in Business Initiative Enthusiast* (GEBI), dr. Hj. Ratu Tenny Leriva, MM yang juga anggota DPD RI dari Sumatera Selatan. Penyerahan dilakukan oleh Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI bersama Ketua GAPKI Sumsel, Alex Sugiarto dan Aida Fitria, Kepala Divisi Kerjasama Kelembagaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPD).

Dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai mendukung kesetaraan gender di sektor sawit antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Pagar Alam, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Rawas. Apresiasi untuk Provinsi Sumatera Selatan diterima langsung Gubernur Herman Deru.

Gubernur Herman Deru mengapresiasi langkah progresif GAPKI dalam perlindungan pekerja perempuan. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Sumsel yang menjalankan inisiatif antara lain pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hukum pasca perceraian, yang menjadikan Sumsel sebagai provinsi pelopor dalam isu perlindungan perempuan. Ia berharap kegiatan ini dilanjutkan dengan kebijakan dan langkah konkret di perusahaan masing-masing. ■



GAPKI DORONG PENGUATAN PERAN ASPEKPIR DI INDUSTRI SAWIT

"Saat itu ekonomi ambruk, tapi sektor perkebunan sawit justru menjadi penyelamat."

GAPKI mendorong penguatan peranan ASPEKPIR Indonesia (Asosiasi Petani Inti Plasma Inti Rakyat) dalam ekosistem industri kelapa sawit di Indonesia. Dorongan ini disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam *Bisnis Forum Kemitraan Petani Sawit 2025* yang diselenggarakan oleh ASPEKPIR di Pekanbaru pada 27 Agustus 2025. Forum ini diikuti oleh perwakilan ASPEKPIR dari seluruh Indonesia, termasuk Dewan Pengawas ASPEKPIR Rusman Heriawan dan perwakilan PTPN IV Regional III Riau.

Menurut Eddy Martono, peran petani inti plasma sangat penting di tengah peningkatan produksi sawit mencapai 100 juta ton pada tahun 2045. Selain itu, asosiasi petani yang bermitra dengan perusahaan sawit ini juga diminta menjadi pendorong realisasi PSR yang sampai saat ini membutuhkan terobosan untuk mencapai target perluasan PSR. Target 100 juta ton akan tercapai apabila PSR berjalan dengan optimal dan ada penambahan lahan baru sekitar 5 juta hektar.

Dalam forum ini juga diungkapkan



salah satu tantangan pencapaian target PSR antara lain penertiban kawasan hutan yang menyasar kebun perusahaan yang sudah mengantongi HGU. Kondisi ini juga dialami sebagian petani mitra dan nonmitra perusahaan. Beberapa lahan sawit milik petani peserta transmigrasi di zaman Presiden Soeharto dan bernaung di bawah ASPEKPIR juga terimbas penertiban kawasan hutan. "Ini harus diselesaikan secara adil agar target 100 juta ton pada tahun 2045 dapat tercapai," katanya.

Eddy Martono menegaskan masyarakat harus terus diedukasi betapa besar peran industri sawit dalam perekonomian nasional. Bahkan, sektor sawit sudah tiga kali menyelamatkan perekonomian Indonesia yakni, ketika krisis ekonomi 1998, krisis moneter 2008, dan saat Indonesia terjankit pandemi Covid-19. "Saat itu ekonomi ambruk, tapi sektor perkebunan sawit justru menjadi penyelamat. Bahkan, ketika

Covid-19, sektor sawit menorehkan devisa tertinggi, ini sangat luar biasa," katanya.

Ketua Umum ASPEKPIR Indonesia Setiyono berharap *Bisnis Forum Kemitraan Sawit* dapat menjadi agenda rutin dan tahunan dalam rangka memperkuat pengembangan sawit berkelanjutan melalui kerja sama kemitraan inti plasma yang saling menguatkan. Apalagi saat ini komoditas sawit menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang tidak lepas dari peran strategis petani sawit plasma. "Kemitraan inti plasma adalah kemitraan strategis yang harus diperkuat," katanya.

Selain berbagi informasi dan pengetahuan, forum ini juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara IIAS Global dan GAPKI Cabang Riau. Penandatanganan dilakukan oleh Country Sales & Project Manager IAS Global, Edi Haryanto dan Ketua GAPKI Riau Lichwan Hartono. ■



BORNEO FORUM 2025 KAJI PR BESAR INDUSTRI SAWIT

“Kalau PSR ini berjalan optimal, masyarakat yang bergantung pada sawit akan lebih sejahtera.”

Sebagai salah satu tumpuan dan penggerak perekonomian nasional, industri sawit masih menghadapi tantangan besar. Apalagi jika dikaitkan dengan target produksi 100 juta ton pada tahun 2045. “Kita punya pekerjaan rumah besar, yakni peremajaan sawit rakyat,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono di depan peserta Borneo Forum ke-8 di Pontianak pada 21-22 Agustus 2025. Ajangan tahunan GAPKI se-Kalimantan ini dihadiri 600 peserta dari pelaku usaha, UKMK, petani, akademisi, dan perwakilan pemerintah.

Program PSR digulirkan sejak 2017. Target luasan lahan yang diremajakan setiap tahun tidak pernah mencapai target. Tahun 2025 ditargetkan 180 ribu hektar. Namun, BPDP menaksir realisasinya sekitar 50 ribu hektar. Realisasi tertinggi tercapai pada tahun 2019 yakni 94 ribu hektar. Banyak faktor yang menyebabkan sulitnya pencapaian target PSR. GAPKI sebagai asosiasi pengusaha sawit mendukung dan berkontribusi penuh pada pencapaian target PSR melalui kemitraan dengan petani sawit.

Menurut Eddy Martono, program PSR bukan tanggung jawab satu dua pihak, namun semua pemangku kepentingan. Sebab, PSR bukan hanya masalah produktivitas lahan, namun juga tentang keadilan sosial. Petani sawit berhak untuk sejahtera karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan industri ini. Di sisi lainnya, ada 16 juta jiwa yang menggantungkan mata pencaharian di sektor ini. “Kalau PSR ini berjalan optimal, masyarakat yang bergantung pada sawit akan lebih sejahtera,” katanya.

Borneo Forum ke-8 yang



mengangkat tema utama *Harmonisasi Kemitraan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dan Tata Kelola Sawit yang Kondusif* dinilai tepat dengan kondisi sekarang. Sebab, sektor sawit sudah 3 kali menyelamatkan perekonomian Indonesia yakni saat krisis 1998, krisis global 2008, dan saat pandemi Covid-19. Sinergi perusahaan sawit berkontribusi besar. Karena itu, GAPKI mengajak perusahaan sawit berjuang bersama GAPKI yang saat ini beranggota 749 perusahaan dengan luas lahan garapan 3,7 juta hektar.

Aris Supratman, Ketua GAPKI Kalimantan Barat mengajak perusahaan sawit di wilayahnya bergabung bersama GAPKI. Saat ini, 325 perusahaan sawit beroperasi di

Kalimantan Barat, 78 di antaranya anggota GAPKI. Dia berharap rekomendasi Borneo Forum ke-8 bisa menjadi bahan perbaikan oleh para pemangku kepentingan sawit. “Semoga menjadi masukan untuk pemerintah, pelaku usaha, dan petani,” katanya.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit Kementerian Pertanian, Baginda Siagian, yang menghadiri forum ini menegaskan pemerintah akan terus mendukung industri sawit sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Komoditas sawit merupakan sektor yang tidak dapat dipisahkan dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni kemandirian energi dan ketahanan pangan. ■

EDUKASI SAWIT UNTUK GENERASI MUDA

Program ini menggali kreativitas siswa melalui majalah dinding dan kreativitas lain bertema sawit.

Memahami kelapa sawit dengan benar merupakan bekal berharga bagi generasi muda tidak mudah terprovokasi kampanye negatif sawit. Mereka perlu mendapatkan gambaran lengkap tentang sawit yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Edukasi kepada generasi muda inilah yang dilakukan GAPKI dan BPDP dalam program *Sobat Sawit Goes to School* di SMKN Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 19 Agustus 2025. Kegiatan ini diikuti 300 siswa dari SMA N 4 Penajam Paser Utara, SMKN 4 Penajam Paser Utara, MAN 1 Babulu, Penajam Paser Utara, SMK Muhammadiyah 1 Penajam Paser Utara, dan SMAN 2 Penajam Paser Utara.

Kegiatan ini bukan sekadar berbagi cerita. Program ini menggali kreativitas para siswa melalui majalah dinding dan kreativitas lain bertema sawit. "Edukasi generasi muda sangat penting agar memahami kontribusi besar sawit pada lingkungan, sosial, dan pembangunan berkelanjutan," kata Rachmat Perdana Angga, Ketua

GAPKI Kalimantan Timur. Kegiatan ini dihadiri Kacab Dinas Pendidikan Kaltim I Dr. Winarno, para kepala sekolah, Komp. Pendidikan Dasar & Menengah GAPKI Intan Nurcahayani, Sekretariat GAPKI Eko Tamba, dan pengurus GAPKI Kaltim.

Rachmat Perdana Angga mengatakan selama ini industri sawit hanya dipahami sebatas sektor perkebunan. Padahal, banyak aspek lain yang perlu disosialisasikan antara lain penyerapan tenaga kerja, penggerak UKMK hingga perannya dalam energi terbarukan. Bahkan, kelapa sawit menjadi tumpuan Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan bahan bakar dari minyak sawit. Bahkan, Indonesia diharapkan menjadi negara terdepan dalam pengembangan energi terbarukan berbasis sawit di masa depan.

Sedangkan Intan Nurcahayani, Komp. Pendidikan Dasar & Menengah GAPKI menegaskan bahwa produk sawit ada sekitar kita setiap hari dan selalu kita gunakan. Bahkan, dalam



siklus 24 jam kehidupan manusia tidak mungkin lepas dari produk yang berasal dari kelapa sawit. "Banyak yang mengira sawit hanya jadi minyak goreng. Padahal sabun, kosmetik, *skincare*, hingga cokelat juga mengandung turunan sawit," katanya. Tidak mengherankan kalau industri sawit membawa *multiplier effect* dari perbaikan jalan hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain itu, tuduhan negatif bahwa kelapa sawit sebagai penyebab utama deforestasi maupun kebakaran hutan dan lahan tidak sepenuhnya benar. Faktanya kebakaran banyak terjadi di luar konsesi perusahaan sawit. Perusahaan sawit, terutama anggota GAPKI sudah menerapkan *Zero Burning* dan program konservasi. "Generasi muda harus mampu menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh *hoax*," katanya.

Sementara itu, Kacab Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Wilayah I Dr. Winarno mengatakan *Sobat Sawit Goes to School* memberi ruang bagi generasi muda mengekspresikan kreativitas dan ide-ide baru yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Ia mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh GAPKI bersama BPDP ini. Adapun Kepala SMKN 3 Penajam Paser Utara, Nurlaili Sunawardhani menyampaikan terima kasihnya atas kepercayaan GAPKI dan dukungan yang diberikan untuk kegiatan positif ini. Apalagi narasumber yang dihadirkan kompeten di bidang masing-masing sehingga memberikan banyak manfaat untuk generasi muda. ■



GAPKI BERIKAN MASUKAN PENILAIAN PROPER 2025

Status anggota GAPKI akan menjadi persyaratan Proper yang baru.

GAPKI mengusulkan penundaan sementara waktu kriteria baru yakni pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3, dan pengelolaan lahan gambut dalam Penilaian Proper 2025. Usulan ini disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada pertemuan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup pada 15 Juli 2025. Dalam pertemuan ini Menteri Hanif Faisol didampingi oleh Deputi Penegakkan Hukum, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, dan pejabat teras Kementerian Lingkungan Hidup lainnya.

Sedangkan GAPKI diwakili oleh Ketua Umum Eddy Martono, Direktur Eksekutif Mukti Sardjono, Kabid Sustainability Dwi Laksono dan tim, Anggota Dewan Pembina Joko Supriyono, dan Ketua GAPKI Kalimantan Selatan Eddy S. Binti. Pertemuan ini membahas banyak hal yang berkaitan dengan pengembangan

industri sawit sekaligus penguatan pelestarian lingkungan. Termasuk juga tentang penilaian Proper 2025 sebagai barometer kepedulian dan kepatuhan perusahaan dalam pelestarian lingkungan.

Masukan dari GAPKI menjadi pertimbangan dalam penilaian Proper 2025. Namun, karena kriteria baru ini sudah diatur dalam peraturan yang lama, kemungkinan besar kriteria ini tetap diterapkan. Terutama yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yang menjadi target nasional. Untuk pengelolaan sampah, GAPKI diminta mendukung penuh. Apalagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pengelolaan sampah tahun 2025 ditargetkan mencapai 50%. Namun, realisasinya masih sekitar 14% sampah yang dikelola.

Sedangkan pengelolaan *High Conservation Value* (HCV) atau nilai konservasi tinggi akan dibuat norma terukur dan pedoman tata kelolanya. Dengan pedoman ini HCV tidak dianggap sebagai lahan terlantar dalam lahan HGU. Selama ini, HCV dinilai sebagai salah satu *tools* yang dapat dimanfaatkan untuk menangkis

kritik global terhadap perusahaan kelapa sawit. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dalam pertemuan ini GAPKI juga mengusulkan penyempurnaan Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2021, khususnya yang terkait dengan limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS). Dalam pandangan Kementerian LH, limbah cair ini memang dapat digunakan sebagai pupuk. Namun, tata kelola LA (*Land Application*) harus dijaga ketat agar tidak merusak lingkungan. Beberapa item yang harus diperhatikan adalah baku mutu air limbah dan pengurangan gas metan. Usulan ini akan dibahas oleh tim khusus.

Kementerian Lingkungan Hidup juga meminta perusahaan sawit bergabung dengan GAPKI untuk komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Bahkan, status anggota GAPKI akan menjadi persyaratan Proper yang baru. GAPKI mengapresiasi langkah Kementerian LH yang mendorong semua perusahaan sawit bergabung dengan GAPKI dan menjadikan persyaratan Proper. ■



LINDUNGI DAN PENUHI HAK ANAK

GAPKI ingin meningkatkan kesadaran tentang hak anak dan membangun reputasi positif di sektor ketenagakerjaan.

Industri kelapa sawit Indonesia terus berbenah agar menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak-anak karyawan perkebunan sawit. Untuk mewujudkan harapan ini dibutuhkan teori dan praktik lapangan secara langsung seperti yang dilakukan GAPKI dalam kegiatan Sawit Indonesia Ramah Anak di Banda Aceh, 27-28 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 123 orang peserta dari berbagai instansi di Aceh, salah satu provinsi penghasil komoditas sawit di Indonesia.

Kabid Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih mengatakan kegiatan ini adalah tindak lanjut dari *Panduan Praktis Sawit Ramah Anak* yang diterbitkan oleh GAPKI. Buku panduan ini bertujuan memperkuat tata kelola industri sawit yang bertanggung jawab, berkelanjutan, serta selaras dengan agenda global yang menekankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Implementasi panduan ini di lapangan disosialisasikan melalui *workshop*, diskusi, seminar dan kegiatan



lain yang mendorong penguatan implementasi di lapangan.

Sesi seminar kegiatan ini menghadirkan Rinaldi Umar (Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker), Dwi Jalu Atmanto (Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA), Prita Bahroeny (Direktur Bahrany Group), dan Sumarjono Saragih. Tema utama yang diangkat adalah *Membangun Aceh Bersama Sawit Ramah Anak*. Adapun sesi workshop yang diikuti 40 orang menekankan pada peningkatan kemampuan teknis perusahaan dalam melindungi dan memenuhi hak anak dan mencegah pekerja anak.

Sumarjono Saragih mengatakan lokakarya peningkatan aspek teknis ini diikuti oleh perwakilan dari 20 perusahaan di Aceh. GAPKI memberikan materi dengan perspektif yang lebih mendalam tentang ketenagakerjaan, perlindungan anak dari kekerasan, peranan sektor swasta, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor sawit. Bersama program Sawit Indonesia Ramah Anak, GAPKI ingin meningkatkan kesadaran tentang hak anak dan

membangun reputasi positif di sektor ketenagakerjaan.

Plt Ketua GAPKI Cabang Aceh, Mawardi menegaskan pekerja anak tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan perkebunan sawit. Sedangkan perempuan yang memenuhi syarat memiliki hak untuk bekerja dan berkarir di industri sawit. Kelebihan kaum perempuan sangat dibutuhkan di sektor sawit.

"Saat ini keterlibatan perempuan di sektor sawit sekitar 30 persen," katanya. Soal anak dan perempuan sangat penting. "Perusahaan memikirkan bagaimana anaknya tetap aman saat ibunya bekerja di sektor sawit," katanya.

Sebagai komitmen sawit ramah anak, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama aksi kolaborasi *Membangun Aceh Bersama Sawit Ramah Anak* oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Meutia Juliana, Plt Ketua GAPKI Aceh Mawardi, Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih, dan Andi Akbar selaku Kepala Sekretariat Nasional PAACLA Indonesia. ■



GUBERNUR KALTIM MINTA GAPKI PERKUAT KEMITRAAN STRATEGIS



GAPKI Cabang Kaltim menyatakan siap meningkatkan sinergi dengan pemerintah.

Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas'ud meminta GAPKI Cabang Kalimantan Timur memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Permintaan ini disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja (Raker) GAPKI Kaltim di Samarinda pada 31 Juli 2025. GAPKI diharapkan menjadi jembatan kepentingan industri dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. "Kami mengajak GAPKI meningkatkan integrasi dan transformasi industri ini," katanya.

Sektor perkebunan di Kalimantan Timur didominasi oleh komoditas sawit. Luas kelapa sawitnya mencapai lebih dari 1,4 juta hektar. Sektor ini menjadi salah satu pilar ekonomi utama yang memberikan kontribusi signifikan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. Selain itu, perkebunan kelapa sawit juga menyerap banyak tenaga kerja, dan memberdayakan masyarakat pedesaan.

Gubernur mengajak GAPKI

memperkuat sinergi karena tantangan industri ini semakin besar, baik tantangan dari dalam dan luar negeri. Beberapa tantangan yang harus dihadapi sektor sawit antara lain fluktuasi harga CPO global, isu lingkungan, regulasi perdagangan, sampai kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas petani swadaya. "Penguatan tata kelola sawit melalui sertifikasi ISPO sangat penting," katanya.

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono yang menghadiri rapat kerja ini menegaskan sawit berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan negara. "Nilai ekspor sawit yang berhasil dicapai pada 2024 sebesar USD 27,76 miliar atau sekitar Rp 440 triliun, katanya. Bahkan pada tahun 2022 kontribusi sawit lebih besar dan mencatat rekor devisa tertinggi yakni USD 39 miliar atau Rp 600 triliun. "Neraca perdagangan sawit masih positif," katanya.

Selain mendatangkan devisa untuk negara, komoditas sawit juga berkontribusi terhadap penghematan devisa. Pada tahun 2023, devisa yang

berhasil dihemat dari implementasi bahan bakar nabati alternatif terbarukan atau biodiesel mencapai Rp 120,54 triliun. Di sisi lainnya, industri sawit juga menyerap banyak tenaga kerja yang menjadi faktor penting perputaran dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Menyikapi permintaan Gubernur H. Rudy Mas'ud, Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur Rachmat Angga Perdana menyatakan siap meningkatkan sinergi dengan Pemprov Kaltim. Kolaborasi dengan pemerintah merupakan suatu keharusan karena industri sawit tidak lepas dari peran pemerintah dalam regulasi. Selain itu, GAPKI Kaltim juga setuju dengan permintaan Gubernur Kaltim agar perusahaan sawit di daerahnya bergabung dengan GAPKI.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim 2025, terdapat 263 perusahaan sawit di Kalimantan Timur. Namun, yang bergabung dengan GAPKI Kaltim sekitar 30 persen. "Baru 79 perusahaan yang bergabung dalam keanggotaan GAPKI," katanya. GAPKI Kaltim sudah menyatakan komitmen untuk mewujudkan tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan dan hal ini membutuhkan dukungan kuat pemerintah. ■



GAPKI RIAU DORONG PENGUATAN PROGRAM K3

K3 adalah investasi jangka panjang yang berdampak pada efisiensi dan keberlanjutan perusahaan.

Program keselamatan dan kesehatan kerja menjadi faktor penting menjaga keamanan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Karena itu, pengenalan maupun sosialisasi program ini tidak pernah berhenti dilakukan.

Karena itu, GAPKI Cabang Riau mendorong program ini melalui seminar dengan tema *Peran K3 dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja yang Berkelanjutan* di Pekanbaru, 24 Juli 2025. Seminar bertujuan mendorong kolaborasi aktif para pemangku kepentingan dalam implementasi program K3.

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber yakni Ketua PERDOKI Riau Miansyah Kusuma, Wakil Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah III Sumbar-Riau Helena, dan Pengawas Ketenagakerjaan DisnakerTrans Provinsi Riau, Julnaidil. Pembahasan mencakup masalah kesehatan dan medis, perlindungan sosial ketenagakerjaan, hingga regulasi pengawasan.

“Ini penting untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di Riau,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Bobby Rachmat sebagai keynote speaker seminar.

Ketua GAPKI Riau Lichwan Hartono menegaskan keselamatan kerja bukan hanya formalitas, melainkan keharusan yang melekat pada setiap proses kerja.

“Keselamatan dan kesehatan kerja bukan pelengkap, tapi kebutuhan,” katanya. Dengan standar K3 yang baik dan benar, perusahaan kita tidak hanya melindungi pekerja, tapi juga menjaga kesinambungan usaha. Semakin kecil tingkat kecelakaan kerja, semakin besar peluang perusahaan untuk tumbuh dan berkembang.

Sebagai asosiasi pelaku usaha sektor sawit, GAPKI berkepentingan setiap karyawan dapat bekerja dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Selain terhindar dari kecelakaan kerja, mereka juga membutuhkan jaminan kesehatan sehingga dapat bekerja secara optimal.

Menjadikan industri sawit sebagai tempat kerja yang aman dan nyaman menjadi harapan semua pemangku kepentingan sektor sawit. Karena itu, investasi di bidang K3 merupakan investasi jangka panjang yang berdampak pada efisiensi dan keberlanjutan perusahaan.

Seminar K3 yang diadakan GAPKI

diharapkan Kadisnakertrans Provinsi Riau Bobby Racmat dapat menekan angka pemutusan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.

Provinsi Riau pada Februari 2025 menjadi penyumbang PHK terbesar ketiga secara nasional, setelah Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran terbuka di Riau meningkat dari 3,7% pada Juli 2025 menjadi 4,12% pada Agustus 2025. Sebagian besar penyumbang PHK adalah sektor perkebunan.

Ketua GAPKI Riau Lichwan Hartono menekankan pentingnya membuka akses kerja seluas mungkin. Sebab, banyak masyarakat yang siap bekerja, namun terkendala oleh persyaratan administratif.

“Kalau di sektor sawit yang penting punya niat kerja. Tenaga kerja tidak harus bergelar tinggi, tapi harus sadar akan pentingnya keselamatan kerja,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, GAPKI Riau berharap dapat melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat penerapan sistem K3 yang efektif di perkebunan sawit. Seminar ini sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan, inovasi, dan praktik terbaik yang bisa diadaptasi lintas perusahaan demi menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. ■

GAPKI-BEI TINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG PASAR MODAL

Kerjasama dalam nota kesepahaman ini mencakup tiga poin yang dijalankan kedua belah pihak.

Industri sawit terbukti memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak biasa. Bahkan, paling tidak tiga kali industri ini menyelamatkan perekonomian nasional. Meski demikian, jumlah perusahaan perkebunan sawit yang terdaftar di pasar modal Indonesia belum sebanding dengan 3.000 perusahaan sawit lebih yang beroperasi di Indonesia. Padahal pasar modal merupakan salah satu pintu penting dalam pengembangan perusahaan sawit.

Untuk meningkatkan wawasan perusahaan kelapa sawit anggotanya, GAPKI dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Pasar Modal di Indonesia di Gedung BEI pada 17 September 2025. Penandatanganan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Sedangkan BEI diwakili oleh Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, Sunandar dan Direktur Keuangan, SDM, dan Umum, Risa E. Rustam.

Penandatanganan nota kesepahaman ini juga disaksikan oleh perwakilan GAPKI antara lain



Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng, Bendahara Umum GAPKI Mona Surya, dan Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono.

"Kami meyakini sinergi antara dunia usaha dan pasar modal akan memperkuat posisi Industri sawit Indonesia serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Apalagi kerjasama ini dinilai cukup strategis bagi anggota GAPKI, terutama dalam hal penyertaan modal publik untuk pengembangan perusahaan sawit.

Kerjasama dalam nota kesepahaman ini mencakup tiga poin yang dijalankan kedua belah pihak. Pertama, meningkatkan literasi dan *awareness* anggota GAPKI terhadap instrumen dan peluang pembiayaan di pasar modal. Kedua, membuka akses pendanaan jangka panjang yang dapat mendukung ekspansi usaha, peningkatan produktivitas, serta inovasi teknologi. Ketiga, mendorong tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan prinsip transparansi,

akuntabilitas.

Selain penandatanganan kerjasama, pertemuan ini dilanjutkan dengan *workshop* tentang pasar modal yang diikuti oleh anggota GAPKI. Kegiatan *Go Public Workshop* ini mengusung tema utama *Go Big With Go Public* ini menghadirkan narasumber kompeten di bidang investasi pasar modal. Pengetahuan dan pengalaman para praktisi dan ahli di pasar modal diharapkan meningkatkan wawasan tentang pembiayaan untuk dunia usaha.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono berharap anggota GAPKI menjadikan *workshop* pasar modal ini sebagai motivasi dan inspirasi dalam pengembangan usaha. Modal yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar perusahaan diharapkan dapat diakses lebih terbuka melalui pasar modal. "Semoga penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi langkah awal yang lebih produktif menuju kolaborasi yang lebih erat di masa mendatang," katanya. ■



MEMPERLUAS AKSES SAWIT BERKELANJUTAN DI CHINA

Produk inovatif berbasis sawit memperlihatkan wajah baru industri sawit Indonesia.

Sebagai salah satu pasar ekspor utama minyak kelapa sawit Indonesia, posisi China sangat strategis dan menjanjikan. Konsumsi minyak nabati yang tinggi menjadikan minyak sawit sebagai salah satu tumpuan untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Tahun lalu, China mengimpor 6 juta ton minyak sawit dari Indonesia. Karena itu, akses pasar ke China perlu diperluas melalui promosi sawit berkelanjutan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan GAPKI.

Tahun ini promosi sawit berkelanjutan dilakukan di *China-ASEAN Expo (CAEXPO)* dan *China-ASEAN Business and Investment Summit (CABIS)* di Nanning International Convention and Exhibition Center (Nicc) pada 16-19 September 2025. Tahun ini merupakan CAEXPO-CABIS ke-22 yang diselenggarakan di Kota Nanning. BPDP dan GAPKI memfokuskan pada promosi Sawit Baik yang menekankan pada keberlanjutan, keterlacakan (*traceability*), dan kontribusi sawit bagi perekonomian nasional.

Promosi sawit berkelanjutan ditampilkan di Paviliun BPDP sekaligus menjadi sarana untuk berbagi informasi kepada pengunjung. Selain produk sawit, paviliun ini juga menampilkan produk kreatif dari UMKM binaan. Salah satunya Smart Batik yang mengolah hasil samping kelapa sawit menjadi produk unik seperti sandal, tas, dan kerajinan tangan lainnya. Produk ini sukses menarik perhatian pengunjung pameran, yang antusias menanyakan bahan baku, proses produksi, hingga peluang kemitraan bisnis.

Produk inovatif berbasis sawit memperlihatkan wajah baru industri sawit Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada ekspor CPO, tapi juga menghasilkan produk turunan bernilai tambah tinggi. "Ini sarana promosi strategis untuk lebih mengenalkan sawit berkelanjutan Indonesia di pasar China," kata Wakil Ketua Umum I GAPKI, Sany Anthony. China juga bisa menjadi pintu masuk untuk mengenalkan industri sawit Indonesia kepada dunia.

"CAEXPO-CABIS ini memberikan ruang strategis bagi kami untuk menyampaikan pesan bahwa Indonesia berkomitmen pada prinsip keberlanjutan," katanya.



Selain mempromosikan tata kelola sawit yang semakin baik, forum ini juga tempat strategis guna membuka peluang bagi diversifikasi produk hilir dan UMKM berbasis sawit.

Menurut Sany Anthony, kehadiran pelaku industri sawit Indonesia di arena CAEXPO-CABIS sebagai bukti Indonesia tidak hanya membawa komoditas unggulan, tetapi juga visi jangka panjang untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah sawit tingkat global. Karena itu, sinergi GAPKI dan UMKM akan terus diperkuat sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen dan pemasok utama sawit dunia sekaligus bermanfaat nyata bagi petani, pelaku UMKM, dan masyarakat luas sekitar perkebunan. ■

GAPKI TEGASKAN KOMITMEN PADA KESEJAHTERAAN BURUH

GAPKI menegaskan kepesertaan BPJS adalah kewajiban bagi setiap pekerja.

GAPKI kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dengan memastikan penerapan upah minimum provinsi, memberikan jaminan sosial, serta mendorong seluruh anggota mengikuti sertifikasi ISPO dan standar ketenagakerjaan yang berlaku secara nasional maupun internasional. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Umum II GAPKI Susanto dalam audiensi dengan Koalisi Buruh Sawit (KBS) di Kantor GAPKI pada 10 September 2025.

KBS terdiri dari perwakilan buruh dan organisasi masyarakat sipil dari daerah penghasil sawit di Indonesia. Mereka antara lain Ismet Inoni (Koordinator KBS), Harwanto Harry (Serbusaka Kalimantan Selatan), Yublina Oematan (FSBKS Kalimantan Barat), Ahmad Syukri (Lingkar Borneo), Dinda Wahid (TURC), dan delegasi FNV Belanda. Sejumlah pengurus GAPKI Bidang Pengembangan SDM dan *Sustainability* hadir mewakili GAPKI.

Menurut Susanto, GAPKI telah melakukan banyak terobosan untuk mendukung komitmennya dalam mensejahterakan buruh. Selain itu, GAPKI juga telah menerbitkan beberapa panduan bagi perusahaan anggotanya seperti *Panduan Perlindungan Pekerja Perempuan*, *Panduan Sawit Ramah Anak* dan *Panduan Pekerja Harian*. Terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja para buruh, GAPKI telah membentuk Forum K3.

Sebagai organisasi yang menaungi



749 perusahaan sawit di Indonesia dengan total luas lahan mencapai 3,9 juta hektar, GAPKI hadir sebagai representasi industri sawit nasional. Peranan yang dijalankan oleh perusahaan tidak sebatas pengelolaan perkebunan dan produksi minyak kelapa sawit.

Lebih jauh dari itu, GAPKI menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembahasan isu-isu ketenagakerjaan dan kebijakan sektor sawit.

Susanto mengatakan GAPKI dapat memahami aspirasi yang disampaikan KBS terkait buruh harian lepas yang belum mendapatkan kepastian status. Begitu juga dengan peralatan kerja, terutama peralatan APD yang perlu ditingkatkan.

"GAPKI mendorong anggotanya meningkatkan profesionalisme pekerja di sektor sawit," katanya. Salah satu program yang dijalankan adalah pelatihan intensif bagi pemanen baru sebelum dipekerjakan secara

permanen.

Terkait buruh lepas harian, Susanto menegaskan sejak 2016 anggota GAPKI telah beralih dari penggunaan sistem buruh harian lepas meskipun pada 2022 kembali dibuka program PKWTSH untuk mendidik pekerja dengan mekanisme yang terstruktur. Selain itu, GAPKI menegaskan kepesertaan BPJS adalah kewajiban bagi setiap pekerja.

Selain isu kesejahteraan, audiensi ini juga mendorong perlindungan perempuan dan mencegah pekerja anak yang akan menjadi fokus kegiatan bersama pada November 2025. Dalam audiensi ini GAPKI dan KBS sepakat memperkuat dialog sosial antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Diharapkan pertemuan ini dapat menjadi titik awal bagi terbentuknya industri sawit yang lebih adil, berkelanjutan, serta berorientasi pada perlindungan hak-hak pekerja. ■

GAPKI PERKUAT KERJASAMA DENGAN INDIA

Kerjasama ini difokuskan pada penguatan perdagangan CPO yang berkelanjutan.

India merupakan salah satu pasar penting CPO Indonesia karena permintaan dan potensi pasarnya cukup signifikan. Permintaan pasar India terhadap minyak sawit Indonesia pada tahun 2025 ini diperkirakan mencapai 5 juta ton. Untuk mendukung penguatan ekonomi serta ketahanan pangan, GAPKI dan *Indian Vegetable Oil Producers Association* (IVPA) menandatangani MoU berdurasi tiga tahun.

Penandatanganan nota kesepahaman dengan durasi tiga tahun ini dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Presiden IVPA, Mr. Sudhakar Desai di sela-sela konferensi *IVPA Global Roundtable 2025* di New Delhi, India pada 24 Juli 2025.

Kerjasama ini difokuskan pada penguatan perdagangan CPO yang berkelanjutan sebagai komoditas utama dalam hubungan dagang minyak nabati kedua negara. Selama ini, India mengimpor 60% lebih kebutuhan minyak nabatinya dari berbagai negara di mana Indonesia menjadi salah satu pemasok utamanya.

Kerjasama ini diharapkan dapat memperluas inisiatif bersama dalam promosi keberlanjutan, fasilitasi perdagangan yang setara, dan memperkuat ekosistem pangan regional yang stabil, inklusif, dan bertanggung jawab.

Dalam forum internasional ini, GAPKI mendapat kepercayaan untuk memaparkan kondisi dan perkembangan industri sawit di Indonesia. Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Hasan mempresentasikan materi dengan tema *Indonesia's Balancing Act: Sustainability Mandates and Competitive Advantage in Global Markets*. Topik ini dinantikan oleh



pasar minyak nabati dunia terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang meningkatkan penggunaan minyak sawit dalam program biodiesel.

Menurut Eddy Martono, India adalah pasar potensial. Apalagi negeri Bollywood ini telah memangkas bea masuk CPO dari 20% menjadi 10% untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dan strategi meningkatkan ketersediaan minyak nabatinya serta mengendalikan harga. "Saya yakin ekspor CPO ke India tahun 2025 ini bisa lebih dari 5 juta ton," katanya. Harga minyak sawit juga mendukung karena diperdagangkan di bawah harga minyak kedelai sehingga daya saingnya meningkat.

Selain memperkuat kerjasama perdagangan, Indonesia mendukung rencana India yang akan memperluas perkebunan sawit domestiknya.

Dukungan Indonesia diberikan dalam bentuk ekspor 100 ribu bibit sawit ke India tahun ini sebagai bagian dari *National Mission on Edible-Oils-Oil Palm* (NMEO-OP).

Saat ini, lahan sawit di India masih sekitar 350 ribu hektar. Pada tahun 2025-2026 India menargetkan menanam sawit di lahan seluas 1 juta hektar.

Dalam catatan GAPKI, sepanjang tahun 2023-2024 India telah mengimpor 500 ribu benih sawit dari Indonesia. Tahun ini ada tambahan impor sekitar 100 ribu benih. "Indoensia siap mengeksport dalam skema *business to business*," katanya. Karena itu, penguatan kerjasama dengan India harus dilakukan semaksimal mungkin karena potensi pasar di negara dengan populasi penduduk di atas 1 miliar jiwa ini sangat besar. ■

Organized by



REGISTER NOW!

Secure Your Spot at
IPOC 2025 Today!

21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook

IPOC 2025

12 - 14 NOVEMBER 2025 • BICC - Bali, Indonesia

**Navigating Complexity, Driving Growth:
Governance, Biofuel Policy and
Global Trade**

Information & Registration : www.gapkiconference.org

EVENT HIGHLIGHT

Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty

Bali International Convention Center (BICC) | 6-8 November 2024

CONFERENCE

13-14 NOV 2025

Mangupura Hall - BICC



EXHIBITION SHOWCASE

13-14 NOV 2025

BICC



GAPKI GOLF TOURNAMENT — 12 NOV 2025

New Kuta Golf Club



WELCOME COCKTAIL RECEPTION — 12 NOV 2025

Temple Garden - The Westin Resort



NETWORKING NIGHT — 13 NOV 2025

Mangupura Hall - BICC

SESSIONS & INVITEE SPEAKERS

"Navigating Domestic Government Policies in Palm Oil Industry"

Abdul Roni Angkat* • Eniya Listiani Dewi* • Eddy Abdurrachman • Khor Yu Leng • Budi Mulyanto

"Trade Strategies for Palm Oil: Addressing Tariffs, Market Access, and EUDR"

Sathia Varqa • Oscar Tjakra • Alain Rival • Izzana Salleh • Andri Hadi

"Palm Oil in a Shifting World: Regional Perspectives"

Pietro Paganini • Atul Chaturvedi • Abdul Rasheed Jan Mohammad • Kian Pang Tan • Alvin Tai

"Economic Outlook and Market Trends"

Ryan Chen • Julian Conway McGill • Thomas Mielke • M. Fadhil Hasan • Dorab Mistry

**) to be confirmed*

Titanium Sponsor



Diamond Sponsor



Platinum Sponsor



Gold Sponsor



Silver Sponsor



Welcome Cocktail Sponsor



Golf Sponsor



Media Partner

